

BAB 1 PENDAHULUAN

...history (...) that conjured up the great threat: the great danger that we would be caught up in a war without end; the great danger that all our relations, whatever the might be, would always be of the order domination. And it is this twofold threat—a war without end as the basis of history and the relationship of domination as the explanatory element in history—that will, in the historical discourse of the nineteenth century, be lessened, broken down into regional threats and transitory episodes, and retranscribed in the form of crises and violence.
(Michel Foucault, 10 March 1976)

A. Latar belakang

Dalam salah satu ceramahnya di College de France pada 10 Maret 1976, Michel Foucault mengungkapkan pandangan-pandangannya tentang pemikiran politik, termasuk di dalamnya masalah ‘nation’ dan ‘state’. Sebagaimana sedikit dikutipkan dari pidatonya di bagian atas, Foucault melihat bahwa dalam sejarahnya (khususnya pada abad 19) masyarakat dalam sebuah negara dihantui oleh dua persoalan pokok; perang tanpa akhir dan struktur kekuasaan yang dominatif. Keduanya jelas bukan pilihan ideal. Yang menjadi penting kemudian adalah bagaimana memaknai kehadiran ‘nation’ sebagai sesuatu yang sesuai dengan tuntutan pada masing-masing zaman.

Foucault mengambil sejarah abad 18 sebagai contoh, bagaimana konsep ‘nation’ yang dominan saat itu adalah konsep yang dikembangkan oleh monarki absolut, di mana suatu bangsa hanya eksis dalam posisinya sebagai bagian dari raja. Demikian pula keberadaan setiap individu di dalam suatu negara, hanya diakui sebagai bagian dari milik raja. Mengutip sebuah manuskrip tahun 1829, Foucault menulis; *“Every particular subject represents only a single individual to the king”*. (PE Lemontey, *Oeuvres*, Paris. Vol. V, 1829, dalam Foucault, 2003: 217).

Tetapi pada dekade berikutnya, Foucault melihat telah muncul definisi yang berbeda mengenai ‘nation’, antara lain yang dikembangkan di Sieyes (Prancis), yang menegaskan bahwa, untuk dapat hidup, suatu ‘nation’ harus memiliki undang-undang (*common law*) dan lembaga legislatif (*a legislature*). Berbeda dengan pandangan monarki absolut, Sieyes melihat bahwa untuk dapat hidup sebuah bangsa tidak memerlukan kehadiran raja. Sebaliknya yang

diperlukan hanyalah suatu undang-undang yang jelas dan lembaga yang menyusun undang-undang tersebut. Dalam bahasa Foucault; *'If there is to be a nation, there must, according to Sieyes, be explicit laws, and agencies to formulate them'*. (Foucault, 2003: 218) Sieyes juga meyakini bahwa, hakikatnya suatu bangsa itu sudah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan suatu pemerintahan negara. (*...the nation exists even before any government is formed, even before the sovereign is born, and even before power is delegated.* (Foucault, 2003: 218)

Dalam tatanan lama, eksistensi bangsa ditentukan oleh hubungan-hubungan yang didefinisikan dengan; perang, pertempuran, invasi, dan pertempuran, yang kemudian membelah Perancis menjadi dua bangsa; bangsa penakluk dan bangsa pecundang. Tetapi dalam definisi yang modern (sebagaimana ditunjukkan oleh Sieyes), eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh fungsi-fungsi yang bisa diperankan oleh bangsa tersebut, dalam hal ini adalah untuk kepentingan perdagangan, pertanian, dan berbagai karya lain. (*a nation can exist as a nation, and can enter history and survive through history, only if it is capable of commerce, agriculture, and handicrafts; only if it has individuals who are capable of forming an army, a magistrature, a church, and an administration.* Foucault, 2003: 220).

Meski bukan merupakan bagian yang utama dalam pemikiran Foucault, tetapi pembahasannya tentang nasionalisme dirujuk dalam studi ini karena adanya aspek penting dari pemikirannya yang kemudian akan dijadikan sebagai pijakan analisa dalam studi tentang nasionalisme Indonesia. Aspek-aspek penting tersebut adalah teori-teori yang dikemukakannya, khususnya mengenai 'genealogy' dan 'power/knowledge', yang memang diakui sebagai sumbangan mendasar yang diberikan Foucault ke dalam ilmu sosial. 'Genealogy' dan 'Power/knowledge' sebagaimana nanti akan dilihat dalam studi ini, merupakan perangkat analisa yang tajam untuk melihat kehadiran kekuasaan di balik konstruksi sosial apa pun, termasuk konstruksi wacana tentang nasionalisme itu sendiri. Konteksnya dalam studi tentang nasionalisme Indonesia, adalah hendak melihat konstruksi kekuasaan seperti apakah yang berada di balik nasionalisme Indonesia?

Membahas Indonesia selalu menarik. Salah satunya adalah karena

keluasan wilayah ini. Melihat peta Indonesia yang begitu luas membentang dari barat ke timur sepanjang 5.000 kilometer, melintasi tiga zona waktu, yang terdiri atas 13.000 pulau lebih, dengan penduduk lebih dari 200 juta orang, dan di dalamnya hidup tidak kurang dari 200 suku dan etnis, seringkali membuat para pengamat internasional terkagum-kagum pada apa yang dilihatnya. “A Glance at map might seem to be enough to suggest the improbability of Indonesia”, tulis Cribb (1999: 3). Hal senada juga diungkapkan Indonesianis dari Cornell University, Ruth McVey yang mengilustrasikan membangun Indonesia tak ubahnya mendirikan raksasa (*building behemoth*), sebuah gagasan yang nyaris tidak masuk akal (*the nation-state is a chimera*). (McVey, 1996). Gabungan antara ‘kekaguman’ dan ‘ketidak-masuk-akalan’ itu cukup beralasan, mengingat begitu kompleksnya komposisi masyarakat yang berada di dalamnya. Inti dari persoalan yang hendak mereka angkat adalah; dengan cara seperti apa negara dan bangsa yang begitu luas dan kompleks itu ditata?

Pertanyaan seperti ini belakangan semakin kuat bermunculan di kalangan pengamat Indonesia. Pernyataan Robert Cribb berikut ini barangkali mewakili pandangan skeptis para pengamat asing dewasa ini;

“East Timor is no longer a part of Indonesia. Aceh and Papua are seething with secessionist tension. The resource-rich provinces of Riau and East Kalimantan have put in ambit claims for independence, and talk has even been heard of independence demands from Bali and Sulawesi. The Indonesia experiment, a multiethnic state stretching more than 5,000 kilometers from east to west, is under challenge today as never before, and all over the Asia pacific region defense analysts are pondering the question of whether the early 21st century saw the disintegration of the Soviet Union and Yugoslavia. For the first time since the second world war, there is a serious possibility that the extended archipelago to Australia’s north (roughly from PNG through Malaysia) could be divided not into five or six states as at present, but into a dozen or more”. (Cribb, 2001: 298, direproduksi dalam Emmerson, 2005: 26)¹

¹ Timor Timur kini tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Aceh dan Papua sedang mendidih oleh ketegangan pemisahan diri. Propinsi yang kaya sumber daya Riau dan Kalimantan Timur telah memperlihatkan keinginannya untuk merdeka. Pengalaman Indonesia, Negara multiethnic yang merentang dari timur ke barat sepanjang lebih dari 5000 kilometer, kini sedang menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya, dan seluruh analis pertahanan di wilayah Asia pasifik sedang mempertimbangkan permasalahan bagaimana awal abad 21 telah menunjukkan disintegrasi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Untuk pertama kalinya wilayah yang terletak di sebelah utara Australia itu (kasarnya dari Papua New Guinea hingga

Berbagai pergolakan yang marak di sejumlah daerah, khususnya pasca jatuhnya Soeharto pada 1998, kuat mengindikasikan bahwa jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan akan segera tiba. Lepasnya Timor Timur pada 1999 (hanya setahun setelah reformasi terjadi), ditambah kerasnya tuntutan kemerdekaan di Aceh dan Papua, semakin kuat mengindikasikan apa yang disebut ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ akan segera berakhir. Lalu, ‘Mampukah Indonesia bertahan sebagai negara kesatuan?’ (*Can Indonesia survive as unitary state?*). Donald Emmerson (2001), yang secara eksplisit mengajukan pertanyaan ini, setelah mencermati berbagai perkembangan yang terjadi, sampai pada kesimpulan; *Indonesia akan bertahan. Dan Indonesia akan bertahan lagi. Asalkan Jakarta mampu membekali dan memelihara dengan baik suatu kesatuan negara yang direlakan—bukan kesatuan negara yang dipaksakan.* (Emmerson, 2001: 666).

Krisis ekonomi-politik dan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, juga membuka kesadaran tentang lemahnya daya ikat Indonesia sebagai ‘negara kesatuan’. Konsepsi mengenai ‘negara kesatuan’ yang digagas para pemimpin negeri ini pada tahun 1950—sebagai pengganti dari bentuk negara yang diberikan oleh Belanda ‘negara serikat’/‘negara federal’--tiba-tiba kini menjadi topik yang penting untuk dikaji kembali. Pangkalnya adalah pada tidak adanya rasa keadilan pada masyarakat di berbagai daerah selama lima puluh tahun lebih berada dalam ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’. Atas nama ‘negara kesatuan’ Jakarta selama ini memperlakukan daerah sebagai obyek yang seluruh aspeknya hanya ditentukan berdasarkan pertimbangan dan ukuran-ukurannya sendiri, dan tidak menghargai eksistensi dan aspirasi daerah. Hubungan yang timpang Jakarta-daerah, sudah terlalu berlebihan dan tidak bisa ditolerir lagi.²

Malaysia) bisa saja terpisah, bukan menjadi lima atau enam Negara seperti yang diperkirakan, melainkan menjadi selusin atau lebih negara.

² Mengantarkan buku mengenai ‘Federalisme untuk Indonesia’, Daniel Dhakidae menggambarkan ketimpangan yang terjadi; Irian Jaya hanya mendapat empat persen dari seluruh sumber daya lokalnya, selebihnya ke pusat. Kalimantan Timur, hanya mengkonsumsi satu persen dari seluruh hasil wilayahnya. Demikian pula Aceh, hanya mengkonsumsi setengah persen dari seluruh penghasilan yang berasal dari daerahnya. “Semua itu yang menghidupkan kembali, atau sekurang-kurangnya membuka keinginan ke arah sistem federal,” tulisnya. (Dhakidae, dalam Nasution dkk, 1999: xxvii)

Tuntutan daerah yang semakin marak, ditambah dengan krisis ekonomi berkepanjangan, mengharuskan pengambil kebijakan untuk merombak struktur politik yang dibangun orde baru selama ini, yang terlalu bertumpu pada kekuatan militer dan berparadigma memusat pada negara (*state-centered paradigm*). Konsepsi mengenai 'negara kesatuan' yang mengimplikasikan adanya satu integrasi nasional yang kokoh, belum berhasil diwujudkan. Hal ini jelas dari apa yang dilakukan oleh Orde Baru, bahwa setelah 32 tahun berlangsung, rezim tersebut tidak memberikan landasan apa-apa bagi kokohnya sebuah bangsa, baik dari segi politik maupun ekonomi. Mempelajari perkembangan Indonesia pasca reformasi 1998, Nordholt (2001: 900) berkesimpulan bahwa Indonesia hingga sekarang belum menemukan identitas dan stuktur yang jelas, melainkan baru pada tahap pencarian identitas dan struktur kebangsaannya. Berbagai kajian reflektif pun dilakukan, untuk mengkaji ulang kegagalan Indonesia untuk menemukan identitas dirinya. Apa yang kurang, atau dimana kesalahan itu berada, menjadi pertanyaan penting yang hendak dijawab.

Refleksi atas kegagalan Indonesia untuk melakukan integrasi nasional yang kokoh selama 50 tahun terakhir, juga terjadi di wilayah kajian teoritis. Wacana akademis yang berkembang dalam studi-studi Indonesia selama beberapa tahun terakhir banyak tertuju pada masalah-masalah yang berhubungan dengan soal perlunya penataan ulang sistem sosial, politik dan ekonomi yang dikembangkan oleh negeri ini, agar lebih sesuai dengan perkembangan modern. Tema-tema seperti demokrasi dan pembangunan ekonomi, sangat marak dalam beberapa tahun terakhir, seperti tampak dalam kajian Feith (1962), Robison (1991), Robison & Hadiz (2004), Hill (1994), dan sebagainya. Berbagai kajian terbaru secara lebih tajam mengaitkan topik-topik yang sudah diangkat ilmuwan sebelumnya tersebut, dengan lebih memfokuskan diri pada aspek transisional Indonesia dalam berbagai dimensinya. Hal itu antara lain seperti ditunjukkan oleh Schwartz (2004), Bertrand (2004), Bresnan (2005), Nordholt & Klinken (2007) juga Mann (2005). Kajian-kajian ini semua seolah memberikan catatan kritis atas pemikiran-pemikiran sebelumnya yang terlalu optimistik dalam melihat Indonesia, seperti yang diberikan oleh para ilmuwan seperti George MT Kahin (1952), sebagai pendahulu dalam kajian Indonesia.

Pergeseran fokus dan anggapan seperti ini sangat lazim terjadi, seiring dengan perubahan sosial yang berkembang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga pada tingkat global. Dalam perspektif teoritis, apa yang diperlukan sekarang adalah pendefinisian ulang dan pemaknaan ulang, atas segala hal yang selama ini sudah dianggap sebagai ‘kewajaran’ atau ‘kebenaran’, tak terkecuali pembacaan ulang juga harus dilakukan terhadap apa yang menjadi subyek kajian para Indonesianis itu sendiri; yaitu mengenai apa itu Indonesia. Bahkan, tentang cara bagaimana perumusan mengenai Indonesia dilakukan, beserta segala kepentingan dan akibat yang ditimbulkan oleh penafsiran terhadapnya, menjadi penting untuk dilakukan. Dalam konteks ini, penting untuk menyebut satu kajian yang dilakukan oleh Simon Philpott (2000). Secara garis besar, dalam bukunya yang berjudul *‘Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity’*, Philpott berikhtiar mengeksplorasi bagaimana Indonesia sebagai subyek ilmu politik dibangun dan dimapankan dalam tradisi akademik barat.

Studi-studi tentang ‘Indonesia’ selama ini, menurut Philpott dicirikan oleh lingkungan dimana ia dikaji dan ditulis. Diskursus tentang Perang Dingin, antikomunisme, teori modernisasi, teori ketergantungan, analisis perbandingan rezim, politik kebudayaan, negara industri baru, dan nilai-nilai Asia, semuanya turut memberi kontribusi pada (konstruksi) Indonesia. Philpott menegaskan, tak seorang pun bisa mengklaim bahwa ia memahami keseluruhan Indonesia, karena semua diskursus itu merupakan bagian integral dari pembentukannya sebagai suatu obyek kajian dan imajinasi. Karena itu dalam upaya memahami dan menjelaskan politik di Indonesia, para ilmuwan, pemerintah, pekerja sosial, dan diplomat Barat terpaksa menggunakan kategori-kategori dan konsep-konsep yang hingga sekarang telah menjadikan Indonesia bermakna bagi audiens “Barat”. Untuk dapat melakukan hal itu, Philpott menggunakan pendekatan yang disebut genealogi. Inti dari pendekatan genealogi adalah hendak menunjukkan bahwa perspektif, konsep dan fakta tertentu adalah konstruksi sosial, serta menjauhkan apa-apa yang telah dianggap sebagai natural. Dalam tilikan genealogi, maka ‘pengetahuan tentang Indonesia’ akan tampak bahwa ia dikembangkan dalam asumsi epistemologis tertentu yang itu tidak lain adalah orientalis.

Mengikuti tradisi genealogi Nietzschean dan Foucaultian, Philpott memandang bahwa semua sistem pengetahuan pada hakikatnya arbitrer karena mereka merupakan hasil persaingan berbagai ide, paradigma, dan persepsi. Tetapi genealogi tidak menganggap operasi kekuasaan yang bersifat integral dalam persaingan tersebut sebagai perusakan terhadap kebenaran, namun menganggapnya sebagai prasyarat munculnya kebenaran. Dengan pemahaman ini, maka studi-studi tentang Indonesia dipahami sebagai praktik yang dikondisikan oleh serangkaian aturan tertentu yang memiliki kata pemutus, mana yang bisa diterima sebagai pengetahuan, dan mana yang tidak. “*Naming Indonesia means identifying its characteristics, its spatial limits and deciding who is and is not Indonesian. It has to be invented.*” tulis Philpott.³ (Philpott, 2002:2)

B. Rumusan Masalah

Konsepsi mengenai negara kesatuan, telah menjadi pilihan utama para perintis kemerdekaan Republik Indonesia, dan telah menjadi pijakan utama dalam pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan hingga sekarang ini. Dalam hal demikian wacana Nasionalisme Indonesia diarahkan oleh para elite politik Indonesia, terutama di masa Orde Baru untuk menopang kokohnya eksistensi negara kesatuan (NKRI) sebagai sebuah proyek utama. Secara historis gagasan ‘negara kesatuan’ memuat satu bentuk penolakan atas bentuk ‘federalisme’ yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Pada saat menyerahkan kedaulatan Indonesia dari Belanda yang dilakukan pada 27 Agustus 1949, disebutkan bahwa negara yang akan dibangun Indonesia adalah berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pada hakekatnya ini adalah pengakuan pada federalisme Indonesia. (Kahin, 1991: 564) Bentuk negara seperti ini kemudian dirubah oleh para elite politik Indonesia menjadi Republik Indonesia, dan dengan demikian secara terminologis Indonesia menjadi suatu ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’, *Unitary State Republic of Indonesia*. Tampak

³ Penamaan Indonesia berarti pengidentifikasian karakteristiknya, batas-batas spasialnya, dan memutuskan siapakah yang dimaksudkan sebagai orang Indonesia dan siapa yang tidak. Indonesia adalah suatu invensi.

nyata bahwa pengalaman penjajahan panjang yang antara lain akibat perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia-lah, menyebabkan gagasan tentang negara kesatuan ini cepat diterima dan menggantikan bentuk RIS yang hanya berumur delapan bulan.

Presiden Soekarno-lah yang pertama-tama memberi corak yang kuat dari bentuk negara kesatuan ini, dengan konsepsinya mengenai 'geopolitik', dimana ia beranggapan wilayah geografis suatu negara sudah ditentukan secara alamiah, yang keberadaannya mudah sekali dilihat dan dideteksi batas-batasnya. Pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan:

“Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia jang bulat, bukan Djawa sadja, bukan Sumatera sadja, atau Borneo sadja, atau Selebes sadja, atau Ambon sadja, atau Maluku sadja, tetapi segenap kepulauan yang ditundjuk oleh Allah swt, mendjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita! Kesinilah kita semua harus menudju: mendirikan suatu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saja yakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan jang dinamakan 'golongan kebangsaan'. Kesinilah kita harus menudju semuanja.” (dalam, Swantoro, 2002: 294, Feith & Liddle, 1988: 18)

Kebijakan Indonesia untuk memasukkan Papua pada tahun 1969, dan kemudian Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia 1975, dapat dilihat memiliki akarnya pada konsepsi mengenai 'negara kesatuan' seperti yang tergambar dalam pandangan Soekarno di atas. Langkah-langkah ekspansif itu, oleh para elite politik Indonesia dimaknai sebagai upaya mengintegrasikan wilayah yang 'memang sudah semestinya menjadi bagian dari Indonesia, sekaligus menjaga kedaulatan negara itu sendiri.' Argumentasi mengenai 'negara kesatuan' dan 'langkah-langkah integratif' tersebut belakangan banyak menuai kritik, karena pada kenyataannya hal itu justru menimbulkan perlawanan yang justru berkebalikan dari semangat 'negara kesatuan' itu sendiri. Apalagi belakangan juga semakin luas dipahami bahwa dalam semua langkah yang berkaitan dengan langkah-langkah penyatuan Indonesia tersebut lebih banyak didominasi oleh agenda-agenda asing. Cukup banyak informasi

mengenai keterlibatan sejumlah negara asing di balik langkah-langkah ekspansif yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya terhadap Timor Timur. Demikian pula tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Aceh, Riau dan Papua, terlalu banyak menghasilkan kekecewaan dan juga kejahatan kemanusiaan, yang akhirnya menimbulkan perlawanan yang kuat di daerah-daerah tersebut. Ujungnya, semangat berbangsa dalam konteks 'nasionalisme Indonesia' di kalangan masyarakat lokal (seperti yang terlihat di Aceh, Riau, Timor Timur dan Papua) bukannya menguat, melainkan justru melemah, bahkan memunculkan wacana tandingan yang berwatak etnik (dan dalam beberapa kasus, secara politik diarahkan pada pembenaran bagi jalan separatisme).

Sementara itu secara teoritis, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upayanya membangun negara yang terintegrasi secara utuh dalam semangat nasionalisme Indonesia, juga melibatkan sejumlah anggapan-anggapan mengenai hakikat Indonesia, hakikat negara dan juga bagaimana hubungan antara negara dan rakyatnya seharusnya dibangun. Dalam konteks ini, perlu ditinjau lebih mendalam bagaimana sebenarnya kalangan ilmuwan sosial membahas masalah ini. Dalam konteks ini kritik yang dikemukakan Simon Philpott (2002) cukup menarik. Ia mengatakan bahwa, kajian tentang Indonesia yang dihasilkan oleh para ilmuwan Barat selama ini tak lain dibingkai dan dibentuk dalam diskursus akademik yang diatur oleh asumsi-asumsi liberal. Karena itu pula, pada akhirnya, realitas kehidupan Indonesia pun ditundukkan oleh kategori analisis yang liberal dan realis. Kritik Philpott penting diketengahkan, karena ia sebenarnya sedang membahas dan mempersoalkan aspek konstruksi wacana (suatu perspektif diskursif) tentang Indonesia, satu dimensi penting yang sangat menentukan tetapi sangat jarang dirambah oleh para ilmuwan yang menaruh perhatian terhadap Indonesia. Mengembangkan tradisi Foucaultian, Philpott mempertanyakan kembali hal-hal yang selama ini nyaris sudah dianggap 'selesai' mengenai apa itu Indonesia.

Demikian pula masalah 'pewacanaan tentang nasionalisme' yang dilakukan pemerintah Orde Baru, perlu diperiksa lebih mendalam, karena tampaknya ia juga merupakan suatu kelanjutan dari rangkaian episode penting

yang menandai pergulatan Indonesia dengan apa yang disebut Philpott sebagai ‘asumsi-asumsi liberal’ tersebut. Di dalamnya tidak saja menunjukkan kuatnya agenda asing (terutama AS dan sekutu ekonominya) di Indonesia, tetapi juga membawa Indonesia masuk ke dalam pusaran arus neo-liberalisme dunia. Rapuhnya pijakan/fondasi nasionalisme Indonesia—yang mengharuskan kuatnya basis sosial-budaya dan *civil society*—tampaknya bisa dilacak dari aspek konstruksi wacana tentang nasionalisme Indonesia itu sendiri.

C. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari asumsi demikian, persoalan yang hendak diangkat dalam penelitian ini singkatnya dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kekuasaan Orde Baru mengkonstruksi gagasan (mewacanakan) tentang nasionalisme Indonesia, khususnya melalui pernyataan para elitnya?
2. Secara teoritis-sosiologis, bagaimana relasi kekuasaan-pengetahuan berinteraksi dalam pengkonstruksian wacana nasionalisme Indonesia tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Hendak menggambarkan bagaimana elite politik Orde Baru dengan kekuasaan yang dimilikinya mengkonstruksi wacana tentang nasionalisme Indonesia, dan sekaligus juga menggambarkan bagaimana masyarakat lokal melakukan counter wacana (wacana tandingan) atas konstruksi wacana nasionalisme Indonesia yang dibangun oleh elite politik Orde Baru tersebut.
2. Secara teoritis studi bertujuan untuk melakukan analisa atas tentang bagaimana relasi kekuasaan-pengetahuan (*power/knowledge*) di dalam kontestasi produksi wacana nasionalisme ke-Indonesiaan tersebut. Konteksnya adalah bahwa serangkaian produksi wacana nasionalisme itu dijalankan di dalam suatu situasi dimana modernisasi sedang menapakkan diri dan globalisasi sedang ‘menggulung’ eksistensi negara bangsa itu sendiri. Pada tahap ini, studi ini hendak merefleksi tentang wacana ke-

Indonesia-an, yang barangkali dewasa ini, sebagaimana dikatakan Philpott (2000), didominasi oleh 'asumsi-asumsi liberal'.

E. Signifikansi Penelitian

Selama ini sudah banyak kajian tentang nasionalisme Indonesia. Tetapi belum banyak yang secara spesifik dan mendalam menempatkan aspek relasi kuasa-pengetahuan sebagai bagian penting dalam produksi wacana tentang nasionalisme Indonesia, khususnya dalam perspektif sosiologis. Sejauh yang dapat peneliti telusuri, belum banyak kajian yang komprehensif dan intensif mengenai aspek-aspek yang berada di balik produksi wacana nasionalisme yang digagas oleh pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan kajian tersebut.

Karena itu, penelitian tentang *Makna Nasionalisme Indonesia: Sebuah Pendekatan Diskursif di Era Orde Baru* ini memiliki beberapa signifikansi; **Pertama**, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan intensif tentang bangunan pemikiran (yang sudah merambah dalam berbagai bentuk gerakan sosial politik) yang tengah berkembang di tengah masyarakat, dan mengiringi terbentuk dan berubahnya struktur nasionalisme Indonesia. **Kedua**, secara teoritik, kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan teori dalam perspektif sosiologi mengenai nasionalisme Indonesia mutakhir, sebab selama ini kajian dalam topik yang mirip dengan topik ini, lebih banyak dilakukan ilmuwan dari disiplin di luar sosiologi (terutama politik, hukum, antropologi dan sejarah). Dan **ketiga**, secara praktis, hasil-hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan publik maupun bagi kalangan aktivis sosial dalam melakukan pembaharuan tatanan kemasyarakatan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam membahas tentang wacana nasionalisme Indonesia ini, ada beberapa kerangka teori yang akan digunakan, yaitu teori tentang 'hakikat nasionalisme' menurut beberapa ilmuwan sosial, dan 'power/knowledge'

menurut Michel Foucault. Di sini akan dikemukakan beberapa poin penting mengenai kedua hal tersebut, yang dianggap relevan untuk pembahasan topik yang diangkat dalam penelitian ini, di dalam perspektif sosiologis.

F.1. Nasionalisme

Nasionalisme telah menarik perhatian para sosiolog, sebenarnya bukan karena tema nasionalisme itu sendiri, melainkan karena topik nasionalisme telah menumbuhkan suatu agenda besar yang selama ini menjadi perhatian para sosiolog yaitu transformasi besar yang dialami umat manusia dari pra-modern dan pra-industri menuju masyarakat modern dan masyarakat industri. Dalam konteks ini para sosiolog sebenarnya hanya ingin mengembangkan suatu teori yang lebih umum tentang masyarakat. Sejak awal kemunculan sosiologi, sebenarnya pada pendiri sosiologi seperti Marx, Weber dan Durkheim telah membahas masalah nasionalisme ini. Tetapi mereka tidak pernah menjadikan topik tersebut sebagai suatu pusat kajiannya. Marx membahas nasionalisme dalam kaitannya dengan sejarah perjuangan kelas dalam kehidupan umat manusia, Durkheim melihat nasionalisme dan negara sebagai organ dari disiplin moral, sementara Weber meletakkan nasionalisme sebagai instrumen politik.

Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan sosial mulai mengkaji topik nasionalisme secara lebih serius. Khususnya sejak berakhirnya pendudukan negara-negara Eropa dan Jepang terhadap negara-negara Asia dan Afrika di tahun 1950an, kajian tentang nasionalisme menjadi sangat intensif dilakukan. Diantara kajian-kajian tersebut dapat kita sebut beberapa nama; Ernest Gellner, Anthony Smith dan Benedict RO'G Anderson. Pokok-pokok gagasan ketiga pemikir tersebut tentang nasionalisme diikhtisarkan dalam paragraf-paragraf berikut.

Di kalangan ilmuwan sosial Ernest Gellner yang berkebangsaan Perancis dikenal sebagai modernis. Ia mulai menaruh perhatian terhadap nasionalisme pada tahun 1960-an ketika ia menulis esai *Thought and Change*. Pada tahun 1983 ia menerbitkan buku *Nations dan Nationalism*. Di dalam tulisan-tulisannya, selalu tampak bahwa ketertarikan Gellner terhadap nasionalisme ini adalah pada problem klasik tentang bagaimana dan mengapa nasionalisme itu

muncul di dalam konteks industrialisme. Jawaban Gellner merujuk kepada ciri-ciri dan tuntutan masyarakat modern dan industrialis itu sendiri, di mana di dalamnya menuntut adanya egalitarianisme dan mobilitas individu di dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dan politiknya. Tuntutan-tuntutan ini memang cocok dengan gagasan yang diusung nasionalisme, yang hendak menggeser tatanan budaya lama seperti adanya status budaya atau kelas, yang selama ini membelenggu masyarakat untuk bergerak bebas (sesuatu yang selama ini, menurut Gellner merupakan atribut masyarakat pra-modern). Jadi, nasionalisme, menurut Gellner, adalah ideologi politik dan kebudayaan modernitas.

Masyarakat industri modern mengandaikan adanya kemampuan individu untuk melakukan mobilitas tinggi lintas batas apa pun, termasuk batas-batas status dan kelas. Dalam struktur masyarakat lama (pra-modern dan pra-industri), kebebasan semacam ini tidak dimungkinkan, karena adanya batas-batas yang tak mungkin dilewati, seperti jaring-jaring budaya (seperti kelas, kasta, adat istiadat, status dan lain-lain). Meski demikian Gellner juga menyadari bahwa meski di dalam nasionalisme terdapat nilai-nilai egalitarianisme, selalu ada potensi untuk melakukan politik eksklusi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang lebih lemah. Karena itu Gellner melihat nilai positif kehadiran negara di dalam nasionalisme, yaitu bahwa negara harus bisa melakukan akulturasi dengan cara memberikan pendidikan dan pelayanan fasilitas-fasilitas lain, sehingga menjaga tatanan masyarakat tetap berada di dalam kesetaraan. John Hall mengomentari teori Gellner dengan mengatakan, *'His theory of nationalism contained a tension between dislike of its potential for political exclusion and realization that the nation-state remained the receptacle most likely to advance citizenship'*. (McCrone, 1998: 64)⁴

Sampai di sini jelas bahwa teori Gellner tentang nasionalisme merupakan sesuatu yang benar-benar modernis, dan memandang masa lalu dan segala bentuk atributnya sebagai tidak memiliki relevansi sama sekali. Bagi

⁴ Teori Gellner tentang nasionalisme memuat satu ketegangan antara kebencian terhadap potensi politik eksklusi yang dimilikinya, dengan realitas bahwa nation-state merupakan wadah yang paling memungkinkan untuk meningkatkan peradaban.'

Gellner, nasionalisme bukan muncul secara kebetulan, juga bukan merupakan ‘penemuan’, namun lebih sebagai akibat yang tidak bisa dielakkan dari terjadinya transisi ke arah modernitas yang melibatkan segenap masyarakat dunia sejak abad ke delapan belas. Modernisasi menghasilkan jenis masyarakat industri baru, menuntut tenaga yang mobil, terpelajar dan berjumlah banyak, mampu terlibat dalam kerja sistematis dan komunikasi yang bebas konteks. Dalam konteks seperti ini, masyarakat membutuhkan suatu wadah untuk berhimpun dan berkomunikasi secara egaliter. Di sinilah maka nasionalisme, menurut Gellner, merupakan suatu keharusan bagi masyarakat modern.

Pandangan yang lain tentang nasionalisme dikemukakan oleh Anthony Smith (2003). Smith memberikan definisi nasionalisme sebagai; suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu ‘bangsa’ yang aktual atau ‘bangsa’ yang potensial. Smith berbeda pandangan dengan Gellner dalam menempatkan masa lalu suatu masyarakat di dalam nasionalisme. Jika Gellner melihat masa lalu sebagai aspek yang tidak relevan bagi kemunculan nasionalisme, Smith melihat nasionalisme selalu memiliki keterkaitan dengan masa lalu. Karena pandangannya inilah Gellner memandang Smith sebagai evolusionis. (Smith, 2003: 11)

Smith sendiri mengelompokkan dirinya ke dalam aliran etno-simbolisme. Etno-simbolisme, menurut Smith, memfokuskan perhatian kepada unsur-unsur subyektif dalam kelangsungan etnie, pembentukan bangsa-bangsa, dan dampak nasionalisme. Tidak berarti bahwa faktor-faktor ‘obyektif’ diabaikan begitu saja atau malahan disingkirkan dari perhatian analisisnya. “Yang terjadi hanyalah penekanan terhadap unsur-unsur subyektif seperti kenangan, nilai, sentimen, mitos, dan simbol, dan karena itu paradigma ini berusaha memasuki dan memahami ‘dunia dalam’ etnisitas dan nasionalisme. Pendekatan etno-simbolik mengarahkan perhatian pada cara bentuk-bentuk identitas kolektif masa lalu mempengaruhi bangkitnya bangsa, di tengah-tengah keterputusan dan ketidaksinambungan dalam catatan sejarah. (Smith, 2003: 71) Pendekatan etno-simbolis menaruh perhatian pada dimensi populer, moral, emosional dari identitas etnik dan nasional. Karena pendekatannya yang

demikian, menurut Smith, etno-simbolik dapat membantu kita dalam memahami kelangsungan maupun transformasi identitas-identitas budaya kolektif ini. Posisi etno-simbolis semakin jelas ketika Smith mengatakan, seperti tersirat dari namanya, 'etno-simbolisme' mengalihkan fokus analisisnya dari faktor-faktor yang murni eksternal: politik dan ekonomi atau sosiobiologis, ke faktor-faktor budaya: simbol, kenangan, mitos, nilai dan tradisi.

Gagasan ketiga mengenai nation disampaikan oleh Benedict Anderson. Dalam bukunya *Imagined Communities* (1991) Anderson merumuskan bangsa (*nasion*) sebagai komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Gagasan Anderson tentang bangsa menyangkut empat hal pokok; *terbayang*, *terbatas*, *berdaulat* dan *komunitas*. Pertama-tama, bangsa adalah sesuatu yang terbayang (*imagined*) karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Meski demikian, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang merasuk mendalam, dan melebar mendatar.

Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas (*limited*), karena bangsa-bangsa paling besar pun, yang anggotanya mungkin semilyar manusia, memiliki garis-garis perbatasan yang pasti meski elastis. Di luar perbatasan itu adalah bangsa-bangsa lain. Tak satu bangsa pun membayangkan dirinya meliputi seluruh umat manusia di bumi. Dalam bahasa Anderson, para nasionalis yang paling mendekati sikap 'juru selamat' pun tidak mendambakan datangnya hari agung dimana seluruh anggota spesies manusia bakal bergabung dengan bangsa mereka dengan cara seperti, pada zaman-zaman tertentu, orang-orang Kristen memimpikan sebuah planet yang seutuhnya Kristen.

Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat (*sovereign*), lantaran konsep itu lahir dalam kurun waktu dimana Pencerahan dan Revolusi memporak-porandakan keabsahan ranah berbagai tatanan sebelumnya. Bangsa-bangsa bermimpi tentang kebebasan, dan andai pun di bawah lindungan Tuhan, itu terjadi secara langsung, tanpa perantara. Panji-panji kebebasan ini adalah

negara berdaulat. Keempat, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas (*community*), sebab tak peduli akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-mendatar. Rasa persaudaraan semacam inilah yang memungkinkan begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, bersedia, jangankan melenyapkan nyawa orang lain, merenggut nyawa sendiri pun, rela demi pembayangan tentang yang terbatas itu. Apa sebenarnya yang menjadikan pembayangan-pembayangan yang kian menciut dalam kerangka sejarah terkini bisa menggugah pengorbanan yang luar biasa, seperti dalam sejarah kemerdekaan Indonesia sendiri? Ben Anderson meyakini bahwa, jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada akar-akar budaya nasionalisme.⁵

Menurut Daniel Dhakidae, kritik yang dikemukakan Anderson dalam buku *Imagined Communities*, semata diberikan kepada kekeliruan yang memberikan Nasionalisme dengan huruf 'N' besar yang seharusnya 'n' dengan huruf kecil. Dalam arti nasionalisme dengan huruf 'n' kecil maka nasionalisme akan lebih mudah dipahami bila orang memperlakukan nasionalisme sejajar dengan 'kekerabatan' dan 'agama', bukannya dengan 'liberalisme' atau 'fasisme'. (Dhakidae, dalam Anderson, 2002: xxxv)

Meski demikian nasionalisme bukan 'impian', akan tetapi suatu 'bangunan' yang terdiri dari 'bayang-bayang' yang pada gilirannya merumuskan aksi. Ditempatkan dalam perspektif itu nasionalisme menjadi

⁵ Buku *Imagined Communities* mendapat inspirasi awal dari perang yang terjadi di Vietnam dan Cambodia ketika kedua negara yang sama-sama berprinsip Marxis ini saling berperang. Dalam kasus Vietnam, RRC memberikan dukungan besar untuk mempertahankan Vietnam Merah, Viet Cong. Dalam kasus Cambodia, Vietnam berada mati-matian di belakang Hun Sen yang kelak membentuk pemerintahan boneka Vietnam untuk menghancurkan Pol Pot bersama Khmer Rouge, Khmer Merah. Barat kemudian terlibat dengan mendukung Pol Pot yang beberapa waktu sebelumnya dikutuk mati-matian oleh Barat, bahkan Raja Sihanouk dalam suatu gerak yang membingungkan memihak Pol Pot yang membasmi jutaan rakyatnya. Dengan mengambil contoh Vietnam dan Cambodia buku ini membicarakan betapa bangsa dan kebangsaan memiliki sisi sejarah kemanusiaan yang sangat buruk. Bangsa, dibayangkan sebagai sebuah komunitas bersama yang kadang tak peduli akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa. Pergolakan di Vietnam dan Cambodia, telah memperlihatkan bagaimana sebetulnya kesadaran palsu tentang bangsa dan kebangsaan yang dipupuk oleh kekerasan dicoba tanamkan dalam kehidupan manusia. Nasionalisme memang bisa dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam, dan melebar mendatar. Tetapi, dalam banyak kasus, rasa persaudaraan yang begitu agung kerap kali dipakai oleh kekuasaan untuk kepentingannya sendiri.

perumus tindak dan memiliki konsekuensi sangat serius, yang memungkinkan ‘begitu banyak orang...bersedia jangan melenyapkan nyawa orang lain...merenggut nyawa sendiri demi pembayangan yang terbatas itu.’ Karena itu, menurut Dhakidae, dalam banyak hal nasionalisme menemukan ‘bangsa’, dan mengumumkan ‘negara’ dan dalam prosesnya lagi, negara menemukan bangsa. Inilah yang terjadi dengan Indonesia saat mengambil Timor Timur menjadi bagiannya karena menganggap bahwa ‘Timor Timur adalah wilayah Indonesia yang tertunda kelahirannya, dan yang akan lahir pada saatnya yang tepat.’

Namun atas dasar pertimbangan kecocokan antara fenomena politik integrasi nasional yang dilakukan Orde Baru (beserta seluruh asumsi-asumsi dasarnya) dengan abstraksi teoritis yang ada, maka teori Ernest Gellner akan lebih banyak digunakan untuk melakukan analisa dalam studi ini. Bagi Gellner, nasionalisme bukan sesuatu yang kebetulan muncul, juga bukan merupakan ‘penemuan’, namun lebih sebagai akibat yang tak bisa dielakkan dari terjadinya transisi ke arah modernitas, yang melibatkan segenap masyarakat dunia sejak abad ke delapan belas. Sebagai akibatnya, nasionalisme diperlukan secara sosiologis—di dunia modern. (Gellner, dalam Smith, 2002: 79) Gellner mengartikan modernisasi sebagai industrialisasi beserta faktor sosial budayanya, telah mentransformasikan seluruh masyarakat seperti yang dilakukan oleh revolusi neolitik sekitar 8.000 tahun yang lalu. Modernisasi menghasilkan jenis masyarakat industri baru, yang menuntut tenaga kerja yang mobil, terpelajar dan berjumlah banyak, mampu terlibat dalam kerja semantik dan komunikasi yang bebas-konteks. Sementara dalam masyarakat sebelumnya yang agraris hanya ada sedikit orang yang terpelajar dan orang-orang masih disatukan oleh struktur peran dan institusi yang seringkali didasarkan pada kekeluargaan, di masyarakat industri modern ‘budaya telah menggantikan struktur’. Artinya, bahasa dan budaya menjadi perekat baru bagi masyarakat yang telah terpecah-pecah, yang terdiri dari individu-individu yang telah tercabut dari akar dan tradisinya, yang harus berintegrasi dengan mesin-mesin industri, dan identitas mereka yang baru dan bisa diterima hanyalah kewarganegaraan yang didasarkan pada pendidikan dan budaya. Karena itu, modernisasi telah mengikis tradisi dan masyarakat

tradisional, dan menjadikan bahasa dan budaya sebagai basis tunggal untuk identitas.

Nasionalisme, menurut Gellner merupakan penanda penting transformasi kehidupan umat manusia, dari tahap pra-modern ke tahap modern. Jika pada masa pra-modern ada sejumlah batasan-batasan tertentu yang membuat sekelompok orang tidak bisa dengan leluasa berhubungan dengan kelompok lain (seperti ikatan kelompok tradisional, etnik dan semacamnya), maka pada masa modern, dengan munculnya nasionalisme ikatan-ikatan primordial yang selama ini membatasi seseorang untuk bergerak bebas, menjadi terbuka. Inilah masyarakat modern, yang benar-benar baru, yang tidak membutuhkan unsur-unsur budaya yang ada sebelumnya (pra-modern). Dalam ceramah publiknya yang terakhir mengenai bidang ini, ketika dia beralih bahwa bangsa-bangsa diciptakan pada abad ke-18, dan apapun sebelum masa itu tak ada artinya, ia mengatakan; “Seperti Adam, bangsa-bangsa tidak perlu mempunyai tali pusar”, tegas Gellner (1996, dalam Smith, 2002:81). Bangsa dan nasionalisme dipandang perlu dan fungsional untuk modernitas industri, dan sebaliknya modernitas industri itu dengan sendirinya nasionalis. Formasi sosioekonomik tertentu menuntut jenis budaya dan ideologi tertentu, dan juga sebaliknya demikian.

Jika ditinjau dalam perspektif Gellner, maka apa yang dilakukan pemerintah Indonesia selama beberapa puluh tahun dengan politik integrasi nasional, merupakan suatu bagian yang sudah semestinya dilakukan, sebagai konsekuensi dari modernitas. Tak ada yang perlu dirisaukan, karena memang proses modernisasi adalah sebuah keharusan bagi masyarakat modern, yang tidak lagi memerlukan ikatan-ikatan primordial lama, yang tidak relevan dengan tuntutan alam kemoderenan. Adalah sudah menjadi keharusan sejarah, bahwa masyarakat harus mengikuti kecenderungan baru ini, dengan segala atribut budaya dan bahasanya yang serba baru dan modern. Konsep ini tampaknya sudah dipraktikkan Orde Baru selama masa panjang kekuasaannya, dengan konsepnya yang antara lain dikemukakan oleh Ali Murtopo (1981), yaitu melakukan program modernisasi berupa *‘perubahan dan pembaharuan sistem nilai-nilai’* dan juga *‘perencanaan perubahan sosial’* di dalam kehidupan

masyarakat Indonesia, yang dipandang masih tradisional dan belum maju. Meski demikian, untuk pembacaan yang lebih komprehensif, kritik-kritik yang dikemukakan Anthony Smith atas Gellner menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian analisa studi ini.

Terkait erat dengan teori nasionalisme, yang penting juga untuk dikemukakan di sini adalah konsep mengenai identitas. Di dalamnya bukunya *Nation and Identity*, Ross Poole (Poole, 1999: 44) mengutip pandangan Erik H Erikson tentang apa itu identitas. Dengan menggunakan ilustrasi psikoanalisis, Erikson mengatakan identitas itu berkaitan dengan tahap perkembangan manusia, di mana, di saat seseorang menjelang dewasa dia akan berhadapan langsung formasi sosial di sekitarnya. Ketika seseorang ternyata tidak mampu memasuki formasi sosial tersebut, maka seseorang akan dikatakan mengalami 'krisis identitas'. Dengan meminjam konsep Erikson, Poole menyatakan bahwa, kita memiliki identitas karena kita memang mengidentifikasikan diri kita dengan gambaran atau representasi yang memang disediakan untuk kita gunakan. Jadi konsep identitas, menurut Poole, berimplikasi bahwa ada keterkaitan antara bentuk-bentuk *subyektivitas*, yaitu bagaimana kita memandang orang lain dan diri kita sendiri, dan bentuk-bentuk *obyektivitas sosial*, dimana pola-pola kehidupan masyarakat tempat kita hidup. (Poole, 1999: 45)

Pandangan lain tentang identitas dikemukakan oleh Stuart Hall. Menurut Hall (dalam Dunn, 1998: 25-26), identitas bukanlah sesuatu yang transparan atau tanpa problem seperti yang kita duga. Meski sekilas hal itu tampak sebagai sesuatu begitu saja terjadi, dan telah menjadi praktik-praktik kebudayaan yang direpresentasikan oleh suatu masyarakat, tetapi sebagai suatu 'produk', identitas tidak pernah menjadi sesuatu yang selesai. Dan ia juga selalau berada di dalam (bukan di luar) representasi itu sendiri.

Meski adalah benar bahwa identitas itu dibentuk oleh para partisipannya di dalam tindakan-tindakan sosial dan politik mereka, namun menurut Hall, para partisipan itu sendiri tidak sepenuhnya memiliki terhadap apa yang telah mereka bentuk tersebut. Hall lalu mencontohkan tentang bagaimana dan apa itu identitas Inggris. Menurut Hall, kita hanya tahu apa itu menjadi 'Inggris' hanya karena 'cara-cara ke-Inggrisan' telah direpresentasikan, sebagai seperangkat

makna, oleh budaya bangsa Inggris. “Dengan demikian, bangsa itu tidak sekadar entitas politik, melainkan sesuatu yang memproduksi makna—sebuah sistem representasi budaya,” tegas Hall.

Hall juga mengatakan bahwa, budaya nasional itu merupakan suatu wacana, sebuah cara mengkonstruksi makna yang mempengaruhi dan mengorganisir tindakan-tindakan dan konsepsi-konsepsi kita mengenai diri kita sendiri. Hall mengatakan bahwa, gagasan tentang bangsa sebenarnya merupakan suatu ‘narasi’ yang asal-usulnya tidak jelas, tetapi kekuatan simbolik yang dimilikinya untuk memobilisasikan perasaan identitas dan kesetiaan sangatlah besar. Jadi di sini, menurut Hall, identitas adalah representasi budaya atau diskursus yang memfasilitasi tetapi sekaligus juga membatasi pilihan. Dan yang penting juga adalah bahwa, identitas nasional tidak pernah menjadi sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*), ia merefleksikan kekuatan sosial dan karena itu di dalamnya selalu mengandung kompetisi.

Di dalam sosiologi, menurut Hall, konsep mengenai identitas dibentuk sebagai reaksi atas pandangan kaum ortodok yang mengatakan bahwa identitas itu hanya merupakan karakteristik yang bersifat individual, bahwa pusat inti dari diri itu adalah identitas personal. Sosiologi menolak pandangan demikian, dan mengatakan bahwa identitas itu dibentuk di dalam hubungan signifikan antara satu individu dengan individu yang lain, di dalam suatu interaksi antara diri dengan masyarakat. Lalu apa makna identitas bangsa? Menurut Hall, identitas bangsa merepresentasikan suatu identitas alternatif bagi masyarakat modern, ketika tatanan yang lama tidak lagi memadai. Di sinilah menurut Hall, yang menjadi konsen para sosiolog, bagaimana individu-individu mengkonstruksi dirinya di dalam kerangka identitas nasional. Memang ini seperti mengulang pembahasan isu lama di dalam sosiologi tentang hubungan antara struktur dan tindakan. Tetapi memang di sinilah pentingnya sosiologi menaruh perhatian terhadap isu identitas bangsa, yakni bagaimana identitas suatu bangsa benar-benar merepresentasikan identitas individu-individu di dalamnya. Dalam konteks masyarakat modern sekarang ini, Hall juga membahas, identitas bangsa, biasanya dilihat lebih sebagai proyeksi ke masa depan daripada jejak-jejak masa lalu.

Di samping soal identitas, hal lain yang juga sering disinggung dalam membahas nasionalisme dalam beberapa tahun terakhir ini adalah konsep mengenai globalisasi. Menurut Anthony Giddens (2001), globalisasi adalah satu tahap perkembangan peradaban dunia yang bersifat revolusioner, yang di dalamnya memiliki dimensi politik, teknologi, budaya dan juga ekonomi. Globalisasi terutama sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan sistem komunikasi yang dimulai akhir tahun 1960-an. Perkembangan teknologi informasi, pada tahap selanjutnya mengubah berbagai dimensi kehidupan, dari yang bersifat publik hingga yang bersifat privat. Globalisasi merupakan serangkaian proses yang kompleks dan seringkali berwujud dalam situasi yang kontradiktif. Giddens mencotohkan, bahwa kebanyakan orang memandang globalisasi hanya akan membawa bangsa dan komunitas lokal untuk bergerak memasuki arena global. Menurut Giddens, hal itu memang benar. Namun arus yang sebaliknya sebenarnya juga sedang berlangsung. “Globalisasi tidak hanya menarik ke atas, melainkan juga mendorong ke bawah, menciptakan tekanan-tekanan baru bagi otonomi lokal.” Dalam konteks inilah, Giddens mengutip pandangan Daniel Bell yang mengatakan, suatu bangsa kini tidak hanya terlalu kecil untuk mengatasi masalah-masalah besar, tetapi juga terlalu besar untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil. Globalisasi juga menjadi alasan bagi kebangkitan kembali identitas budaya lokal di berbagai belahan dunia. “Nasionalisme lokal merebak sebagai respons terhadap kecenderungan globalisasi, seiring dengan melemahnya negara bangsa lama,” kata Giddens.

Globalisasi seperti dikatakan Zygmunt Baumann (1998), dapat juga dimaknai sebagai meleburnya dunia ke dalam satu tatanan besar, yang di dalamnya terdapat kekuatan besar tak bernama (*anonymous forces*) yang bisa menyentuh negara mana pun tanpa mampu dan sempat membela diri; yaitu pasar global. Globalisasi tidak lebih dari suatu bentuk totalitarianisme yang meluas logikanya ke dalam semua aspek kehidupan. Negara tak punya cukup sumber atau kebebasan untuk bergerak menghindari tekanan. Singkat kata, hanya dalam beberapa menit sebuah perusahaan atau negara bisa kolaps oleh kekuatan pasar global ini. Dalam konteks demikian, negara bangsa hanya akan menjadi penjaga keamanan sebuah mega-company. Negara bangsa yang semula

diandaikan memiliki batas-batas wilayah kekuasaan, memiliki kedaulatan, memiliki kekuasaan, kini dihadapan globalisasi, menghilang tak berdaya. Dalam konteks inilah, mengutip GH von Wright, Baumann mengatakan bahwa Negara-bangsa tampak telah tergerus, bahkan mungkin telah lenyap (*the nation-state, it seems, is eroding or perhaps 'withering away'*). (Baumann, 1998: 56)

F.2. Power/knowledge

Konsep mengenai power/knowledge merupakan konsep yang sentral dan pemikiran Michel Foucault. Foucault sendiri sebenarnya menggeluti banyak sekali bidang keilmuan yang berbeda-beda sehingga sangat tidak mudah menggolongkan karyanya hanya dalam satu disiplin ilmu. Yang mempersatukan aneka ragam studinya adalah minatnya pada Kekuasaan dan Pengetahuan (*power/knowledge*), bagaimana keduanya bekerja bersama dalam mengkonstruksi pengetahuan dan kemudian pengetahuan tersebut dianggap sebagai kebenaran (Fillingham, 2001). Tesisnya adalah bahwa pengetahuan hanyalah apa yang dikumpulkan dan diputuskan benar oleh sekelompok orang. Jadi di sini ada kekuatan (*power*) yang merupakan tenaga untuk menentukan kebenaran. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan mental, digunakan oleh suatu minoritas yang kuat untuk dapat memaksakan gagasan mereka tentang yang benar, atau yang betul, pada mayoritas. Apabila kita berbicara tentang pengetahuan mengenai ilmu-ilmu sosial, atau, seperti disebut Foucault, 'ilmu-ilmu manusia', maka orang-orang yang memutuskan apa yang benar (membangun Kebenaran) sesungguhnya sedang mendefinisikan manusia dan mempengaruhi orang secara umum. Jika mereka dapat meyakinkan banyak orang untuk percaya tentang apa yang mereka katakan, maka itu lebih penting daripada kebenaran itu sendiri.

Bagaimana pengetahuan/kekuasaan bekerja? Menurut Foucault, seringkali pengetahuan/kekuasaan dan tenaga fisik bergabung, seperti ketika seorang anak dipukuli orang tuanya untuk memberinya pelajaran. Tapi pertamanya pengetahuan/kekuasaan bekerja melalui bahasa. Pada tingkat dasar, ketika seorang anak belajar berbicara, ia menerima pengetahuan dasar dan aturan-aturan kebudayaannya pada waktu yang sama. Pada tingkat yang lebih khusus,

semua ilmu manusia (psikologi, sosiologi, ekonomi, linguistik, bahkan ilmu kedokteran) mendefinisikan manusia sekaligus menggambarkannya, dan bekerja bersama dengan lembaga-lembaga seperti rumah sakit jiwa, penjara, pabrik, sekolah dan pengadilan agar mempunyai akibat yang khusus dan serius pada orang-orang.

Foucault mengambil contoh pada mekanisme ilmu pengetahuan menggolongkan orang menjadi normal dan abnormal. Buku-bukunya mempelajari berbagai bentuk abnormalitas: kegilaan, kriminalitas, dan seksualitas menyimpang. Dewasa ini orang sudah terbiasa mendefinisikan abnormal sebagai segala sesuatu yang sangat berbeda dengan normal. Normal adalah istilah pokok, dan apa yang normal sepenuhnya harus jelas—semuanya ada di sekeliling kita. Kita juga menganggap bahwa perbedaan mudah dikatakan dan cenderung sama sepanjang waktu. Akan tetapi dengan melihat aneka ragam dokumen sejarah, Foucault menentang semua anggapan itu. Ia menunjukkan bahwa definisi-definisi kegilaan, kesakitan, kejahatan dan seksualitas menyimpang sangat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Masyarakat, pengetahuan/kekuasaan, dan ilmu-ilmu manusia, sejak abad-18, telah mendefinisikan dengan baik dan seksama perbedaan antara normal dan abnormal, dan kemudian menggunakan definisi-definisi ini sepanjang masa untuk mengatur perilaku. Membedakan antara keduanya mungkin kelihatan mudah, tetapi pada kenyataannya teramat sukar—selalu ada batas-batas yang kabur dan menjadi bahan perdebatan hangat. Akibatnya, masyarakat semakin mengurung, mengasingkan, dan menyembunyikan orang-orang abnormal, namun sambil mengawasi, memeriksa, dan mempertanyakan mereka dengan saksama.

Menurut Foucault, dulunya orang gila merupakan bagian yang diterima masyarakat: orang sakit dirawat di rumah sakit: tak ada orang yang mengharapkan orang cacat atau invalid disingkirkan: dan penjahat dihukum sedapat-dapatnya di muka umum. Tetapi disingkirkannya orang abnormal tidak membuat mereka tersingkir dari kebudayaan. Orang normal bukannya didefinisikan terlebih dahulu, kemudian yang abnormal dipertentangkannya! Karena menurut Foucault, kita sesungguhnya mendefinisikan yang normal melalui yang abnormal: hanya melalui abnormalitas kita mengetahui apa yang

normal. Maka dari itu, meskipun abnormalitas disingkirkan dan mungkin disembunyikan, orang-orang yang lain, yang normal, mempelajari dan mempertanyakannya terus menerus, seperti terobsesi. Mempelajari abnormalitas adalah salah satu cara utama bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan dibangun dalam masyarakat. Ketika suatu abnormalitas dan yang berkaitan dengan normanya didefinisikan, sedikit banyak orang normal selalu berkuasa atas orang abnormal.

Dengan cara yang sama, Foucault juga menunjukkan bagaimana kemudian ilmuwan memiliki pengaruh terhadap orang lain, seperti halnya Psikolog memberi tahu kita tentang orang gila, dokter memberitahu kita tentang orang sakit, kriminolog (atau ahli teori hukum atau bahkan politikus) berbicara tentang penjahat, tetapi kita tidak pernah mengharapkan penjahat berbicara tentang semua orang yang lain itu—apa yang mereka katakan telah dinilai tidak relevan, sebab menurut definisi mereka tidak mempunyai pengetahuan (tetapi ini dasar untuk tidak menghendaki mereka berkuasa). Dalam satu kuliah tahun 1976, Foucault juga menyinggung lembaga pengadilan. Menurutnya, sistem pengadilan dan wilayah kekuasaan hukum merupakan agen permanen dari hubungan-hubungan dominasi dan teknik-teknik penaklukan yang bertingkat-tingkat. Karena itu pengadilan, menurutnya, seharusnya dipandang bukan hanya dalam konsep-konsep pembangunan legitimasi, melainkan juga dalam konsep-konsep metode penaklukan yang ditiupkan ke dalamnya. (Foucault, 2002: 118-119)

Yang diperlukan, menurut Foucault adalah studi mengenai kekuasaan dalam wajah eksternalnya, dimana ia merupakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang disebut sebagai obyek, target atau lahan aplikasi kekuasaan tempat kekuasaan itu memasang dirinya dan memproduksi efek-efeknya yang nyata. Foucault juga mendorong orang untuk terus bertanya bagaimana hal ini dapat bekerja pada tingkatan penaklukan pada berbagai proses yang terus berkelanjutan dan tidak terputuskan, yang memaksa tubuh kita, memerintah berbagai bentuk tingkah laku kita, mendikte sikap-sikap kita, dan lain sebagainya. Secara refleksif ia menunjukkan bagaimana sesuatu telah dipaksakan kepada kita secara gradual, progresif, dan benar-benar secara

material dikonstruisikan melalui beragam organisme, kekuatan, energi, materi, hasrat, pemikiran, dan sebagainya.

Sebagai rekomendasinya, dalam melihat bagaimana kekuasaan beroperasi, Foucault mengatakan bahwa; seharusnya analisis kita tidak terarah pada bangunan kedaulatan yuridis, aparat-aparat Negara dan ideologi-ideologi yang bergabung dengannya, melainkan langsung mengarahkan riset pada hakikat kekuasaan, yakni pada dominasi dan operator-operator material kekuasaan, pada bentuk-bentuk pemaksaan, perubahan dan pemanfaatan sistem lokalnya, dan pada aparat-aparat strategis. “Kita harus menjauhkan diri dari model Leviathan ketika meneliti kekuasaan. Kita harus melepaskan diri dari wilayah kedaulatan yuridis dan institusi-institusi negara yang terbatas, dan sebaliknya, mendasarkan analisis kekuasaan kita pada studi mengenai teknik dan taktik dominasi,” tulis Foucault. (Foucault, 2002: 128)

G. Telaah Pustaka

Cukup banyak ilmuwan yang melakukan kajian tentang Indonesia. Kajian terdahulu dilakukan oleh George McTurnan Kahin dalam bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia (1995)*. Dalam buku ini Kahin menggambarkan proses perkembangan pergerakan nasional, pendudukan Jepang dan pergolakan serta perjuangan bangsa Indonesia masa revolusi. Kelebihan Kahin adalah karena ia ikut melihat dan merasakan secara langsung jalannya masa-masa revolusi itu dari jarak yang sangat dekat, dengan mengambil Yogyakarta sebagai tempat tinggal selama masa penelitiannya tersebut. Begitu kuatnya data dan informasi yang diperoleh Kahin, sehingga menurut Miriam Budiarjo (1995) dalam pengantar buku tersebut untuk edisi Indonesia, karya Kahin ini tidak hanya unggul sebagai karya ilmiah mengenai gerakan nasional kita yang terinci, komprehensif dan obyektif, tetapi juga merupakan kesaksian hidup dari sejarah revolusi kita.

Dalam membahas dan menganalisis asal mula nasionalisme Indonesia, Kahin tidak mulai dengan Budi Utomo tetapi kembali ke sejarah Indonesia sejak kedatangan dunia Barat ke Indonesia, khususnya Belanda (VOC) pada

permulaan abad ke 16. Ia membentangkan betapa VOC yang mula-mula datang hanya untuk berdagang, kemudian mengembangkan monopoli dan untuk itu juga membangun kekuasaan politik. Pada abad ke 18, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pimpinan dan kemudian menyelenggarakan kebijakan monopolistik di bidang ekonomi, dalam bentuk *cultuurstelsel* yang kejam. Pada abad ke 20, pemerintah Hindia Belanda, dalam beberapa hal karena didorong adanya kebutuhan obyektif, mulai menerapkan politik etis yaitu dengan memberikan fasilitas pendidikan bagi orang Indonesia meski sifatnya masih sangat terbatas. Namun demikian, sekelompok kecil masyarakat terdidik ini berkembang menjadi cikal bakal suatu kelas menengah yang ikut menggerakkan jalannya revolusi melawan kolonial. Kajian Kahin mengenai nasionalisme dan revolusi di Indonesia dalam perspektif sejarah ini, tak pelak menjadi buku penting yang selalu menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, seperti yang dilakukan oleh pakar asing yang lebih muda seperti Daniel S Lev, Ben Anderson, Herbert Feith, Jamie Mackie dan Harold Crouch.

Kajian penting lain tentang nasionalisme Indonesia ditulis oleh Hans Van Miert (2003) berjudul *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-1930*. Buku ini membahas mengenai keberadaan kaum nasionalis moderat di Hindia Belanda. Istilah moderat di sini menunjuk pada kelompok yang dengan tegas menentang penggunaan kekerasan dan pelanggaran ketertiban umum. Mereka adalah juga kelompok yang ingin mencapai tujuan kemerdekaan atau kebebasan dengan berangsur-angsur, terkadang ikut bekerjasama dengan pemerintah, ikut ambil bagian dalam dewan-dewan perwakilan seperti Volksraad. Mereka tidak mengadakan demonstrasi massal atau pemogokan, dan hanya kadang-kadang saja turut serta dalam aksi-aksi tersebut.

Menurut penulisnya, buku ini lahir karena melihat adanya pembengkokan ganda dalam historiografi tentang pengertian nasionalisme. Terutama pertentangan historis dari negara Hindia Belanda sampai menjadi negara kesatuan Republik Indonesia telah menyebabkan terjadinya pembengkokan pengertian tersebut. Pembengkokan itu terjadi dalam historiografi non-Indonesia, tetapi menurut Hans, yang lebih hebat juga terjadi

dalam kanon sejarah Indonesia sendiri. Yang dimaksud kanon di sini ialah versi sejarah yang dipertanggungjawabkan secara ideologis dan diturunkan oleh lembaga-lembaga resmi ilmu sejarah kepada khalayak ramai orang Indonesia melalui para guru dan penulis buku sekolah, wartawan, pembuat film dan penyusun program televisi, seniman dan pengarang cerita-cerita populer dan roman. Dalam pengertian yang dibengkokkan itu, diberikan perhatian yang berlebihan kepada gerakan radikal dan gerakan nonkooperatif yang menjunjung tinggi cita-cita Indonesia, sedangkan kelompok-kelompok yang memiliki ide-ide lain mengenai Hindia yang merdeka di masa depan dan dengan cara-cara lain untuk mencapai tujuan ini direndahkan atau diremehkan.

Van Miert mengkritik bahwa pendekatan sepihak ini adalah buah dari pengamatan teleologis di masa lalu, yaitu bahwa kaum nasionalis nonkooperatif dan radikal yang akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan dan membangun Indonesia merdeka menurut ide-ide mereka. Gambaran seperti ini sangat menyesatkan. 'Menyesatkan sekali kalau kita hanya menokohkan kaum nasionalis nonkooperatif dan menganggap tokoh-tokoh lainnya tidak lebih dari figuran belaka,' tulisnya. Untuk mengimbangi pandangan seperti inilah buku ini hadir dengan mengusung peran kaum nasionalis Indonesia moderat, kelompok yang ingin mencapai Indonesia merdeka dengan cara berangsur-angsur, bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Kelompok-kelompok yang dibahas di sini adalah Jong Java, Jong Sumatra, Boedi Oetomo, dan Comite voor het Javaans Nationalisme.

Masalah-masalah menarik yang dibahas dalam buku ini antara lain usaha pemerintah kolonial dan kaum radikal untuk mempengaruhi kelompok-kelompok moderat ini, juga ciri regional masing-masing kelompok itu. Mereka berusaha mewujudkan Nasion Jawa dan Nasion Sumatra, sangat kontras dengan kaum nasionalis 'Indonesia' yang tidak pandang etnisitas atau latar belakang budaya. Melalui buku ini, penulis ingin meluruskan sejarah mainstream yang memberikan perhatian berlebihan kepada gerakan-gerakan radikal dan meremehkan kelompok yang bercita-cita sama tetapi memilih jalan yang berbeda. Penulis juga menyajikan beberapa alternatif tentang konsep nasion. Titik tolaknya dalam hal ini adalah interaksi antara sejumlah konsep yang

berbeda namun setra, yakni nasionalisme Jawa, Sumatra dan Indonesia.

Kajian tentang sejarah nasionalisme Indonesia juga dilakukan oleh Frank Dhont (2005) dalam bukunya, *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920-an*. Dalam bukunya ini Frank Dhont mengkaji konsep nasionalisme baru yang dirumuskan oleh kaum intelektual Indonesia pada akhir tahun 1920-an, yang tergabung dalam tiga organisasi pergerakan nasional, yaitu Perhimpunan Indonesia, *Indonesische Studieclub* dan *Algemeene Studieclub*. Ketiga organisasi pergerakan nasional ini dianggap sebagai wadah terpenting bagi kelahiran konsepsi nasionalisme Indonesia yang lebih jelas, bulat dan utuh dibanding dengan konsepsi nasionalisme yang lahir dari organisasi pergerakan nasional pada periode sebelumnya. Konsepsi nasionalisme yang lahir pada dua dekade awal abad ke-20, yaitu sekitar 1900-1920, bisa dipandang masih belum utuh dan tegas dibandingkan dengan periode kedua tersebut. Frank melihat periode itu sebagai puncak evolusi pertumbuhan nasionalisme Indonesia.

Dalam bukunya ini, Dhont memaparkan bahwa ada dua unsur pemegang peranan sentral dalam kelahiran dan penyebaran konsep nasionalisme pada tahun 1920-an, yaitu ketiga organisasi pergerakan tersebut, dan kaum intelektual muda Indonesia yang cerdas dan berani. Menurutnya, Perhimpunan Indonesia, *Indonesische Studieclub* dan *Algemeene Studieclub* berfungsi sebagai wadah kelahiran dan tempat penyebaran konsep, gagasan dan ideologi nasionalisme pada masa pergerakan nasional. Dan pada saat yang sama, Frank menempatkan kaum intelektual muda sebagai pemegang peran dalam lahirnya nasionalisme Indonesia. Melalui buku ini pula penulis melacak tentang asal dan basis kelahiran partai-partai politik dengan ideologi nasionalisme yang menjadi sumber pergerakan nasional dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Secara rinci Frank menguraikan keterkaitan antara gagasan nasionalisme dan pertumbuhan partai politik pada masa itu.

Catatan penting yang juga disampaikan dalam buku ini adalah bagaimana Frank menganalisis faktor mentalitas dan ide-ide yang mendasari kaum intelektual muda melahirkan konsep nasionalisme. Frank melihat ada lima segi orientasi nilai nasionalisme yang melandasi pemikiran dan cita-cita kaum muda dalam menjawab tantangan dan tuntutan zamannya. Kelima segi orientasi

nasionalisme tersebut adalah; non-kooperasi, kepercayaan terhadap kecerdasan dan kemampuan diri sendiri, kemauan bersama, keinginan untuk menciptakan ‘self-determination’ (penentuan nasib sendiri), dan persatuan budaya. Kelima orientasi nilai ini, tampaknya tidak hanya berlaku pada zaman itu, namun juga masih relevan pada saat sekarang ini.

Kajian terbaru mengenai nasionalisme dibuat oleh Jaques Bertrand (2004) dalam bukunya *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Agak berbeda dengan kajian-kajian tentang nasionalisme sebelumnya, Bertrand lebih menonjolkan bagaimana konflik-konflik sosial terjadi di wilayah Indonesia sepanjang Orde Baru dan terus berlanjut hingga sekarang ini, seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Timor Timur, dan Papua. Menurutnya konflik-konflik tersebut menggarisbawahi tentang pentingnya perspektif multikulturalisme untuk diakomodasi dalam pembentukan model nasionalisme Indonesia sekarang ini. Secara mendasar buku ini mengkritik model-model pengelolaan negara yang seringkali semena-mena terhadap realitas pluralisme masyarakat ini. Cara-cara kekerasan dan pembangunan yang berwajah tunggal, tidak akan berhasil, dan hanya menimbulkan kekerasan yang tidak perlu. Setelah mempelajari keberagaman yang begitu luas di Indonesia, Bertrand memberikan satu catatan penting:

National models based on single nations or cultural criteria that exclude or marginalize groups may produce much violence. Political leaders sometimes choose to consolidate states first, before crafting nations or national models. In these circumstances, state repressive instruments are often used to quell secessionist rebellions or groups whose perspectives may differ from that state-leaders. In the ends, however, nationalist dreams cannot escape the realities of multi-ethnic or multicultural diversity. (Bertrand, 2004: 223)⁶

⁶ Model-model negara yang dibangun di atas kebangsaan atau kriteria kebudayaan yang tunggal, yang meminggirkan kelompok-kelompok lain hanya akan melahirkan sejumlah kekerasan. Para pemimpin politik mungkin pertama-tama harus melakukan konsolidasi ke dalam terlebih dahulu, sebelum membuat model-model negara atau kebangsaan. Dalam kondisi demikian, perangkat-perangkat represif negara seringkali digunakan untuk membasmi para pemberontak yang ingin memisahkan diri, atau kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda dengan para pemimpin negara. Pada akhirnya, impian para nasionalis tidak dapat lepas diri dari realitas akan adanya multietnik dan keberagaman kebudayaan’.

Yang tak kalah penting untuk disebut berkaitan dengan kajian tentang nasionalisme Indonesia adalah buku Simon Philpott (2000) berjudul, *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism and Identity*. Melalui buku ini Philpott menunjukkan betapa Indonesia sebagai realitas dan imajinasi tak lain adalah konstruksi sosial para ilmuwan asing, khususnya Eropa. Pengamatan taksonomik yang dilakukan oleh orang-orang Eropa menjadi awal pendefinisian sesuatu yang pada akhirnya menjadi negara Indonesia. Philpott menunjuk dua nama ilmuwan Eropa yang memperkenalkan nama Indonesia, George Earl dan James Logan. Earl dan Logan bukanlah leluhur Indonesia kontemporer. Akan tetapi diskursus pemerintahan kolonial, antropologis, ahli ethnografi, pedagang dan penulis lain adalah bagian dari ikhtiar panjang dan tidak pasti, yang di kemudian hari menjadi Indonesia. 'Penamaan Indonesia berarti pengidentifikasian karakteristiknya, batas-batas spasialnya, dan memutuskan siapakah yang bisa dimasukkan sebagai orang Indonesia dan siapa yang tidak. Indonesia adalah invensi,' tulis Philpott.

Dengan dipandu gagasan Foucault-dian, lewat buku ini, Philpott mengajukan argumen bahwa Indonesia diproduksi dan ditandai secara khusus oleh teori dan asumsi diskursus politik Indonesia. Buku ini berikhtiar mengeksplorasi Indonesia yang muncul dari berbagai upaya yang panjang dalam studi politik pasca Perang Dunia II. Indonesia memiliki kekhasan tersendiri dan secara historis bersifat spesifik. Ia dicirikan oleh lingkungan dimana ia dikaji dan ditulis. Diskursus tentang Perang Dingin, antikomunisme, teori modernisasi, teori ketergantungan, analisis perbandingan rezim, politik kebudayaan, negara industri baru, dan nilai-nilai Asia, semuanya turut memberi kontribusi pada (konstruksi) Indonesia ini. 'Tidak seorang pun bisa mengklaim bahwa ia memahami keseluruhan Indonesia, karena semua diskursus itu merupakan bagian integral dari pembentukannya sebagai suatu obyek kajian dan imajinasi.'

Sementara itu, literatur-literatur yang begitu banyak mengenai Aceh, Riau, Timor Timur dan Papua juga akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebagai latar belakang bagaimana konstruksi mengenai wacana nasionalisme

Indonesia dibangun pada tingkat lokal.⁷ Berbagai kajian tentang nasionalisme yang disebut dalam tinjauan literatur ini menggambarkan bahwa, topik ini merupakan bidang yang penting untuk terus dikaji dan diperbaharui. Sebagian besar kajian-kajian itu memang berangkat dari perspektif sejarah dan politik. Namun dalam perkembangan selanjutnya kajian itu juga menuntut dilibatkannya pendekatan-pendekatan ilmu sosial lain seperti bahasa, budaya, etnik dan tentu saja sosiologi. Dalam konteks demikian, kajian lintas disiplin menjadi pendekatan yang tak dapat dielakkan sebagai model dalam kajian-kajian ilmu sosial.

H. Metodologi Penelitian

H.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskursif, sebuah pendekatan yang memusatkan pandangan peneliti pada wacana-wacana atau gagasan-gagasan yang diproduksi oleh subyek yang diteliti. Penggunaan pendekatan kualitatif diskursif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa; *subject matter* (materi) dalam penelitian ini menyangkut proses dari suatu tindakan yang ditunjukkan oleh teks-teks yang berisi pemikiran, ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh para elite politik pemerintah Orde Baru dalam mengkonstruksi wacana nasionalisme Indonesia dan juga *counter* wacana yang dikonstruksi oleh masyarakat lokal atas wacana Orde Baru tersebut. Dengan melakukan kajian atas diskursus-diskursus tersebut, pada akhirnya studi diharapkan dapat melakukan suatu investigasi atas proses konstruksi Nasionalisme Indonesia yang dilakukan oleh Orde Baru, termasuk peran

⁷ Diantara literatur penting tersebut ditulis oleh Peter Carey bersama sejumlah koleganya, *Generations of Resistance East Timor*, *East Timor at the Crossroads: The Forging of a Nation*, dan *East Timor: Third World Colonialism and the Struggle for National Identity*. Literatur-literatur ini barangkali merupakan serial yang sangat penting untuk melihat kasus Timor Timur dewasa ini, dengan segala problemnya yang sangat pelik. Geoffrey C. Gunn, dalam bukunya *East Timor and The United Nations: The Case for Intervention*, secara tajam menyoroti bagaimana peran-peran intervensi yang begitu nyata dilakukan kekuatan-kekuatan internasional, seperti PBB dan Amerika Serikat, terhadap masalah Timor Timur Sementara itu, kajian tentang bagaimana perjalanan panjang perang gerilya yang dilakukan para pemuda Timor Timur ditulis oleh John G Taylor dalam bukunya, *Indonesia's Forgotten War; The Hidden History of East Timor*, dan juga Allan Nairn, *East Timor's Unfinished Struggle, Inside the Timorese Resistance (A Testimony Constancio Pinto and Matthew Jardine)*. Tak pelak lietarur-literatur ini menyediakan bahan yang kaya untuk dikaji dan dianalisa.

aspek kuasa/pengetahuan yang ada di dalamnya. Pembacaan terhadap teks-teks tersebut tidak dilepaskan dari dibingkai keseluruhan peristiwa sosial yang terjadi di sekitar diproduksinya teks-teks itu sendiri. Dengan cara demikian diharapkan pembacaan terhadap teks-teks tersebut sedapat mungkin bisa menggambarkan maknanya secara kontekstual.

Pendekatan diskursif ini memang berangkat dari asumsi bahwa wacana/diskursus memiliki nilai yang sama pentingnya dengan subyek kajian penelitian kualitatif yang lain (*field research*) seperti individu, kelompok atau kelas sosial sebagaimana yang selama ini sudah umum dipakai para ilmuwan sosial. Pentingnya diskursus dalam memahami dunia sosial antara lain dikemukakan oleh Phillips & Hardy (2002). Mereka mengatakan: "...tanpa diskursus realitas sosial tidak ada, dan tanpa ada pemahaman tentang diskursus kita tidak akan mampu memahami realitas kita, pengalaman kita, atau diri kita." (*Without discourse, there is no social reality, and without understanding discourse, we cannot understand our reality, our experience, or ourselves*).

Sebagai metode analisis, studi ini akan menggunakan Discourse Analysis. Menurut Phillips & Hardy (2002) metode Discourse Analysis menawarkan sejumlah kesempatan baru bagi peneliti untuk mengeksplorasi cabang-cabang empiris dari aspek kebahasaan/linguistik yang telah bekerja dengan caranya sendiri di dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora selama 20 tahun yang lalu. Arahnya adalah untuk melakukan suatu kajian bagaimana realitas sosial dikonstruksikan di dalam ilmu sosial. Ketika metodologi kualitatif yang lain (*field research*) telah menyediakan satu pendekatan yang telah berkembang dengan baik untuk memahami dunia sosial, Discourse Analysis juga melangkah satu tahap berikutnya dalam mencapai satu epistemologi konstruktivis sosial yang kuat, khususnya setelah Berger dan Luckman menerbitkan bukunya *Social Construction of Reality* (1967). Discourse Analysis memfokuskan perhatian pada proses-proses dimana dunia sosial dikonstruksikan dan dipelihara.

Diskursus dalam istilahnya yang umum mengacu pada praktik-praktik aktual berbicara dan menulis. Tetapi secara lebih spesifik, diskursus

didefinisikan sebagai serangkaian teks-teks yang saling berhubungan, dan juga praktik-praktik produksinya, penyebarannya dan menerimaannya yang telah membawa satu obyek tertentu menjadi satu teks (*an interrelated set of texts, and the practices of their production, dissemination, and reception, that brings an object into being*). Contohnya, sebagaimana cukup banyak ditunjukkan oleh Foucault, bagaimana sekumpulan teks dari berbagai macam sumber telah membuat satu diskursus tentang penyakit jiwa membawa gagasan tentang ketaksadaran telah muncul pada abad 19. Jadi bagaimana hubungan antara realitas sosial dan diskursus kurang lebih dapat dijelaskan demikian; realitas sosial itu diproduksi dan dijadikan nyata melalui diskursus, dan interaksi sosial tidak dapat dipahami secara penuh tanpa mengacu kepada diskursus yang telah memberinya makna. Karena itulah, menurut Phillips dan Hardy (2003), sebagai ahli Discourse Analysis tugas kita adalah berusaha mengeksplorasi hubungan antara wacana dan realitas. (*...social reality is produced and made real through discourses, and social interactions can not be fully understood without reference to the discourses that give them meaning. As discourse analysts, then, our task is to explore the relationship between discourse and reality.*) (Phillips & Hardy, 2002: 3)

H.2. Tipe Penelitian

Seperti tampak dalam judul, penelitian ini bersifat analisis diskursif (*discourse analysis*). Secara lebih spesifik studi ini akan menggunakan metode yang disebut *Critical Discourse Analysis (CDA)*. Seperti ditunjukkan Phillips & Hardy (2002), CDA memfokuskan diri untuk melihat pada peran aktivitas diskursif dalam membentuk dan memelihara suatu relasi kekuasaan yang timpang. CDA hendak memaparkan dan menjelaskan penyalahgunaan kekuasaan itu dibuat, diproduksi atau dilegitimasi oleh ucapan dan teks kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga yang dominan. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti berusaha untuk menganalisa ‘perjuangan dialogis (atau perjuangan-perjuangan) yang direfleksikan oleh pengistimewaan pada diskursus tertentu dan meminggirkan diskursus yang

lain. Sebagaimana yang telah digambarkan secara khusus dalam karya Fairlough, perspektif ini memfokuskan diri pada bagaimana aktivitas diskursif membangun ruang sosial yang di dalamnya para aktor bertindak, melalui penguatan konsep, obyek dan posisi-posisi subyek.

CDA memfokuskan diri pada ‘bangunan dalam’ konteks (*the distal context*)—bagaimana ia mengistimewakan aktor-aktor tertentu dengan mengorbankan yang lain, dan bagaimana perubahan-perubahan pada diskursus yang lebih luas menghasilkan keuntungan dan kerugian dalam sejumlah konstelasi yang berbeda-beda. Hal ini tampak sangat kuat dan jelas, khususnya di dalam tradisi Foucaultian. Phillips & Hardy (2002) mencontohkan studinya sendiri yang mengkaji sejumlah sistem pengungsi bagaimana kelompok tertentu di dalam sistem pengungsi itu memiliki hak bicara sementara kelompok lain disuruh diam, dan bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda berusaha memaksakan wacana tertentu yang memberikan kepada kelompoknya masing-masing satu hak berbicara yang lebih besar. (Phillips & Hardy, 2002: 26)

Mengacu pada Fairlough dan Wodak (1997), Eriyanto mengatakan bahwa pada hakekatnya CDA melihat wacana sebagai bentuk dan praktik sosial. CDA menyelidiki bagaimana bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing, agar versinyalah yang paling dominan. Ada lima hal penting yang menjadi anggapan sekaligus juga fokus penyelidikan CDA. *Pertama*, tindakan. Artinya Wacana dipahami sebagai tindakan, sebagai bentuk dari proses dan interaksi sosial. Wacana adalah sesuatu yang bertujuan dan diekspresikan secara sadar. *Kedua*, konteks. CDA selalu mempertimbangkan konteks, seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Karena itu CDA hendak menggambarkan teks dan konteks sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan. *Ketiga*, historis. Dalam pengertian bahwa CDA menempatkan wacana, teks di dalam konteks historis tertentu, dengan pemahaman bahwa suatu teks akan bisa diahami dengan baik jika diletakkan dalam konteks historis kapan teks itu diciptakan. *Keempat*, kekuasaan. CDA selalu mempertimbangan elemen kekuasaan dalam analisisnya. Setiap teks tidak dianggap sebagai muncul secara

alamiah, melainkan karena ada kekuasaan di belakangnya. *Kelima*, ideologi. CDA menganggap bahwa selalu ada ideologi di belakang teks, karena itu aspek ideologi selalu penting untuk dipertimbangkan dalam melakukan analisis wacana. (Eriyanto, 2001: 8-13)

Di samping itu, sebagaimana dikatakan Hidayat (2001), CDA memiliki asumsi epistemologis dan ontologis tersendiri, sehingga membawa implikasi metodologis yang khas—yang berbeda dengan asumsi-asumsi paradigma positivis atau pun konstruktivis. Tolok ukur penilaian kualitas (*goodness* atau *quality criteria*) suatu *Critical Discourse Analysis* juga berbeda dengan yang berlaku bagi analisis wacana positivis atau pun konstruktivis. Salah satu kriteria sebuah studi kritis adalah sifat holistik dan kontekstual. “Kualitas suatu wacana kritis akan selalu dinilai dari segi kemampuan untuk menempatkan teks dalam konteksnya yang utuh, holistik, melalui pertautan antara analisis pada jenjang teks dengan analisis terhadap konteks pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi,” tulis Hidayat (dalam Eriyanto, 2001: xi)⁸

Pendekatan CDA yang seperti ini sering disebut sebagai pendekatan kritikal. Pendekatan kritikal sendiri, merupakan hasil perkawinan silang antara sejumlah pemikiran yang bersifat kritis terhadap dominasi dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Jika paradigma positivis mengakui adanya sesuatu yang obyektif (sehingga selalu mempertanyakan ‘sejauh mana suatu penelitian bisa dijaga obyektivitasnya’), pendekatan kritikal justru melihat bahwa tidak ada yang sesuatu yang obyektif dalam ilmu sosial, semuanya bersifat subyektif. Paradigma kritis menganggap mengukur obyektivitas dalam ilmu sosial tidak diperlukan karena memang tidak ada, yang lebih penting adalah bagaimana menyingkap apa saja dan kekuatan mana saja yang ada di dalam subyek kajian itu sendiri. Jika disederhanakan

⁸ Hidayat juga menepis anggapan umum bahwa analisis wacana hanya merupakan bidang kajian Ilmu Komunikasi. Menurutnya, analisis wacana bisa menjadi kajian dalam bidang-bidang ilmu lain—khususnya dalam lingkup ilmu-ilmu sosial, humaniora dan susastra. Karakteristik CDA yang menekankan sifat holistik dan kontekstual, juga menjadikannya sebagai metode serta teori yang penting bagi kajian multidisiplin. (Hidayat, dalam Eriyanto, 2001: xiii)

dalam tabel, perbedaan kedua paradigma tersebut akan tampak sebagai berikut:

PARADIGMA POSITIVISTIK	PARADIGMA KRITIS
TUJUAN PENELITIAN	
Eksplanasi, prediksi, kontrol	Kritik sosial, transformasi, emansipasi dan penguatan sosial
REALITAS	
Objective realism: Ada realitas yang riil yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal walaupun kebenaran pengetahuan tentang itu mungkin hanya bisa diperoleh secara probabilistik	Historical realism: Realitas yang teramati merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik
POSISI PENELITI	
Peneliti berperan sebagai disinterested scientist dan netral	Peneliti menempatkan diri sebagai aktivis, advokat, dan transformative intellectual
Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada di luar proses analisis teks	Nilai, etika, pilihan moral bahkan keberpihakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis
CARA PENELITIAN	
Objective: Analisis teks tidak boleh menyertakan penafsiran individu	Subjective; Titik perhatian analisis pada penafsiran subjective peneliti atas teks
Intervensionis: Pengujian hipotesis dalam struktur hipothetica-deductive method dengan analisis kuantitative dan teks statistik	Partisipatif: mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial
Kriteria kualitas penelitian: Objective, reliable, dan valid	Kriteria kualitas penelitian: Historical Situatedness, sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik dari suatu teks

Sumber: Hidayat, 1999 (direproduksi dalam Eriyanto, 2006: 50-51)

Dengan metode CDA dan dipandu teori Foucault tentang relasi kekuasaan-pengetahuan, studi ini akan menganalisa bagaimana kekuasaan Orde Baru mengkonstruksi wacana nasionalisme Indonesia, dan juga menganalisa bagaimana counter wacana dilakukan oleh masyarakat lokal. Dalam proses analisa ini, konteks situasi dan konteks budaya, menjadi hal yang penting untuk mampu melihat dengan baik makna teks-teks tersebut.

Kajian dengan mengandalkan pada sumber-sumber tekstual seperti ini, sangat penting untuk membahas tema yang berkaitan dengan persoalan sejarah dan segala hal yang berkaitan dengan masa lalu. Mengacu pada Lawrence Newman dalam bukunya *Social Research Methods: Qualitative dan Quantitative Approach* (third edition, 1997), segala macam bentuk dokumen, baik yang dipublikasikan maupun tidak, merupakan sumber penelitian yang sangat penting. Karena dengan bahan-bahan tersebut seorang peneliti dapat mengkaji dan memahami pemikiran dan perasaan orang-orang di masa lalu. Dokumen tertulis sangat membantu bagi kajian tentang suatu masyarakat dan periode-periode sejarah masyarakat yang sudah mengenal budaya baca tulis.⁹

Yang penting juga, seperti dikatakan Denzin & Lincoln (2003: 57-58) bahwa, pada hakikatnya penelitian kualitatif di dalam sosiologi adalah berpretensi untuk membuat satu rekonstruksi atas sesuatu yang telah terjadi di masa lalu (*an act of ex post facto reconstruction*). Untuk kepentingan itu, segala sumber yang bisa membantu peneliti untuk menjelaskan dan membuat atau merekonstruksi masa lalu tersebut (seperti lukisan, musik, puisi, tarian, pertunjukan balet dan sebagainya) menjadi sumber penting penelitian. Demikianlah, dengan melakukan studi model seperti ini diharapkan penelitian ini bisa membuat satu analisa tentang bagaimana wacana nasionalisme Indonesia dikonstruksikan oleh pemerintah Orde Baru selama masa pemerintahannya yang panjang, yang jejaknya masih kuat terasa hingga sekarang (sebelas tahun pasca kejatuhan rezim tersebut).

H.3. Sumber data

Sumber data penelitian ini diambil dari pidato-pidato dan tulisan-tulisan yang dibuat dan disampaikan oleh para elite politik (yang subyektif—meski tetap berdasar pada pandangan para ahli—peneliti anggap memiliki nilai

⁹ Published and unpublished written documents are the most important type of primary source. Researchers find them in their original form or preserved in microfiche or on film. They are often the only surviving record of the words, thoughts, and feeling of people in the past. Written documents are helpful for studying societies and historical periods with writing and literate people. (Newman, 1997: 396)

penting dalam mewarnai konstruksi wacana nasionalisme Indonesia), seperti pidato Soekarno, Soepomo dan Hatta (para perintis kemerdekaan); Soeharto, Ali Moertopo dan Abdul Kadir Besar (para tokoh dan pemimpin Orde Baru), dan juga Mohammad Daoed Yosoef (Aceh), Tabrani Rab (Riau), Anonim (Timor Timur) dan Manuel Kaisepo (Papua) yang tersebar dalam berbagai sumber. Keempat tulisan yang terakhir ini secara subyektif peneliti anggap penting sebagai bentuk wacana tandingan yang dibuat oleh masyarakat lokal. Sebagian besar dari tulisan yang dijadikan sumber studi tersebut telah disunting oleh para ilmuwan sosial, antara lain Herbert Feith & Lance Castels dalam bukunya *Indonesian Political Thinking 1945-1965* (1988), dan David Burchier & Vedi R. Hadiz dalam *Indonesian Politik and Society: A Reader* (2003), dan dianggap oleh para penyuntingnya sebagai tulisan-tulisan penting yang mewakili aspirasi masyarakat pada zamannya masing-masing. Secara spesifik sumber masing-masing tulisan akan dicantumkan langsung di dalam kutipan yang dibuat.

H.4. Batasan Waktu

Penelitian ini membatasi diri pada satu waktu tertentu, yaitu pada era Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1965/1966 dan berakhir secara formal pada tahun 1998. Pembatasan ini didasarkan pada beberapa asumsi. *Pertama*, bahwa rezim inilah yang tercatat paling lama memegang tampuk kekuasaan Indonesia. *Kedua*, dengan kemampuannya mempertahankan kekuasaan yang begitu lama, Orde Baru juga berhasil menanamkan satu corak tertentu dalam perpolitikan nasional.¹⁰ Burchier & Hadiz (2003) menyebutnya sebagai organisisme. Gagasan inti dari organisisme adalah mengenai ketertiban,

¹⁰ Memeriksa secara seksama tentang gagasan-gagasan dan praktik politik Orde Baru, Daniel Dhakidae (2003) menggambarkan betapa rezim tersebut tak ubahnya sebuah rezim fasis. Dan ada lima tonggak utama rezim seperti itu. *Pertama*, ide tentang kesatuan. *Kedua*, ide tentang tata tentram. *Ketiga*, ide tentang ke-tengah-an, seperti dalam semboyan yang selalu diulang-ulang bahwa Pancasila bukan kiri, bukan kanan, demokrasi Pancasila bukan kanan bukan kiri. *Keempat*, negara organik, yang dalam kosakata politik Indonesia lebih dikenal dengan negara integralistik. *Kelima*, organisasi karyawan yang pada akhirnya membentuk negara karyawan dengan Golongan Karya sebagai puncak dari seluruh paradigma itu. “Hampir semua faktor yang disebut di atas menghantarkan penulis buku ini (Daniel Dhakidae) untuk melihat Orde Baru sebagai suatu rezim neofasisme militer,” tegas Dhakidae (2003: 249)

harmoni dan hierarki. Menurut aliran ini, otoritas di negara Indonesia harus mencerminkan pola-pola yang ditemukan dalam keluarga tradisional dan masyarakat pedesaan yang tertib. Mereka menolak komunisme maupun liberalisme karena dianggap menimbulkan perpecahan, dan itu tidak sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia. Aliran pemikiran organisisme sebagian berakar pada tradisi aristokratis Jawa dan sebagian lagi pada pemikiran Eropa yang antipencerahan, yang menyebar melalui pengaruh pembaru-pembaru hukum Belanda. Aliran pemikiran ini sangat terkenal sebagai 'integralisme' yang diungkap Soepomo dalam sidang-sidang Majelis Konstituante.

Warisannya yang paling nyata di Indonesia adalah prinsip korporatis dalam organisasi politik yang didukung oleh militer dan sejumlah sekutunya. Aliran ini juga yang membantu menopang doktrin dwifungsi, yang menetapkan bahwa militer memiliki peran sosial-politik atas dasar bahwa militer merupakan bagian integral dari 'keluarga nasional'. Tetapi yang paling mendasar dari paham ini adalah memadukan paham pembangunan (*developmentalism*) dengan gagasan bahwa negara dan masyarakat yang merupakan bagian dari 'keluarga besar' yang sama, memungkinkan pemerintah menggolongkan oposisi terhadap dirinya atau terhadap program-program pembangunannya sebagai bukan hanya tidak setia, melainkan juga meremehkan norma-norma budaya Indonesia. Organisme memberi dasar bagi penolakan terhadap segala macam praktik, mulai dari politik partai yang bermusuhan sampai pada pembagian kekuasaan dan pemungutan suara di parlemen, yang kesemuanya dianggap merefleksikan cara-cara liberal dan individualis dan organisasi sosial yang diimpor dari Barat. (Bourchier & Hadiz, 2003: 9) Karena sifatnya yang demikian, ia diasumsikan juga memiliki pengaruh yang paling mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Alasan *Ketiga*, adalah bahwa Orde Baru tampaknya adalah sebuah orde pemerintahan, yang dengan kredo--'pembangunan' dan 'modernisasi'--nya bisa dikatakan mewakili satu semangat kemoderenan di dunia ketiga (dalam kata lain bisa disebut 'nasionalisme baru'), yang merupakan tahapan baru pasca semangat anti-kolonialisme, yang mewarnai 'nasionalisme lama'

yang menghasilkan kemerdekaan itu sendiri. Dan jika diabstraksikan lebih lanjut dalam paradigma perubahan sosial di dalam sosiologi, ia bisa dianggap mewakili satu masyarakat transisional dari pra modern ke era kemoderenan. Meski demikian, karena era Orde Baru bukanlah satu rezim yang muncul dari suasana hampa, dan setelah kepergiannya juga bukan tanpa jejak di masa kini, maka pembahasan mengenai Orde Baru dalam studi ini, selalu juga menginggung masa-masa sebelum dan sesudahnya. Ada pun fokusnya, tetaplah pada Orde Baru itu sendiri. Untuk alasan itu pula di sini dikemukakan juga gagasan Soekarno, Soepomo dan Hatta, tentang nasionalisme Indonesia.

Sementara untuk wacana lokal, studi ini terbatas hanya mengambil sumber yang muncul dari 4 (empat) daerah, yaitu Aceh, Riau ('Riau Daratan'), Timor Timur dan Papua. Hal ini didasarkan pada pembacaan bahwa empat daerah ini memiliki dinamika sosial dan politik yang sangat tinggi, yang mengarah pada satu bentuk separatisme (dan memang salah satu daerah tersebut kini sudah berdiri sendiri sebagai negara yang terpisah dari NKRI; Timor Timur). Meski demikian, pemilihan empat wacana ini jelas tidak dimaksudkan untuk membuat satu generalisasi bagi keseluruhan wacana lokal di Indonesia yang penulis yakini memiliki keberagaman yang luar biasa. Sebagaimana sifat dari metode analisis diskursus, studi ini hanya ingin melakukan pembacaan terhadap satu teks di dalam suatu bingkai konteksnya. Ia berusaha menyelidiki secara historis, konteks situasi, konteks budaya, juga kekuasaan dan ideologi yang turut membentuk dan membingkai kemunculan teks-teks tersebut. Tujuan akhirnya adalah menyingkap bagaimana suatu proses konstruksi sosial terjadi, serta menangkap makna-makna di dalamnya.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan. Di dalam bab ini dikemukakan latar belakang pemikiran dipilihnya topik ini, rumusan permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teoritik, kajian literatur, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab 2: Wacana Nasionalisme Indonesia dalam pandangan Soekarno, Soepomo dan Hatta. Pembacaan ini dimaksudkan untuk memberi latar historis bagaimana wacana nasionalisme Indonesia pada awal kemerdekaan digagas oleh para tokohnya.
- Bab 3: Wacana Nasionalisme Indonesia dalam pandangan Elite Politik Orde Baru. Di sini akan dikemukakan pandangan 3 (tiga) tokoh Orde Baru: Soeharto, Ali Moertopo dan Abdul Kadir Besar.
- Bab 4: Wacana Nasionalisme Indonesia dalam pandangan masyarakat lokal. Di sini akan dikemukakan buah buah teks yang ditulis oleh 4 (empat) orang, yaitu: Mohammad Daed Yoesef (Aceh), Tabrani Rab (Riau), Anonim (Timor timur) dan Manuel Kaisiepo (Papua).
- Bab 5: Relasi Kekuasaan-pengetahuan di balik Konstruksi Wacana Nasionalisme Indonesia: Perspektif Power/Knowledge Michel Foucault (Diskusi Teori). Intinya pada bagian ini merupakan diskusi teori. Di sini hendak dianalisis tentang hakikat wacana nasionalisme Indonesia menurut teori Foucault. Setelah gagasan-gagasan awalnya diketahui, begitu juga proses-proses yang ditempuh, serta hasil akhir juga diketahui, maka akan dilihat secara teoritik, bagaimana wacana nasionalisme Indonesia dikonstruksi dan sekaligus dimaknakan.
- Bab 6: Kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini secara singkat akan dikemukakan beberapa kesimpulan pokok yang meliputi kesimpulan teoritis (sosiologis) dan praktis (kebijakan). Akan disampaikan pula beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dikembangkan berkaitan dengan kajian wacana nasionalisme Indonesia.